

**KEBIJAKSANAAN EKONOMI  
DALAM REALITA BARU DUNIA USAHA INDONESIA**

**Oleh:  
Ginandjar Kartasasmita  
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri**

**Disampaikan pada Musyawarah nasional X Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  
Jakarta, Juli 1998**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 disertai dengan gejolak sosial dan politik sejak bulan Mei 1998, keadaan dan prospek ekonomi makin memburuk, dan ekonomi Indonesia dihadapkan pada krisis yang sangat serius. Jaringan distribusi macet, secara keseluruhan kegiatan ekonomi termasuk ekspor terganggu, dan kepercayaan dunia usaha sangat terguncang. Sebagai akibatnya, nilai tukar rupiah terus melemah, dan laju inflasi jauh lebih tinggi dari perkiraan APBN 1998/1999. Karena sumber penerimaan dalam APBN makin tidak mencukupi, pengeluaran terpaksa dikurangi sampai ke tingkat yang dapat berakibat memburuknya pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selain itu, bantuan likuiditas dalam jumlah yang besar terpaksa harus disediakan untuk menanggulangi penarikan dana secara besar-besaran yang terjadi pada bank-bank komersial, terutama bank swasta.

Dengan adanya gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan memburuknya kepercayaan dunia usaha dalam beberapa minggu terakhir ini, PDB riil diperkirakan menurun lebih dari 10 persen pada tahun 1998. Namun kita percaya bahwa penurunan kegiatan ekonomi akan berhenti begitu program ekonomi berjalan dan begitu kepercayaan pelaku ekonomi pulih kembali. Di dalam pasar valuta asing yang transaksinya kecil, nilai tukar sangat mudah bergejolak dan didominasi oleh perubahan cepat kepercayaan pasar, dan oleh karena itu nilai tukar pada dasarnya sulit untuk diperkirakan.

Program yang diperbaharui ini didasarkan atas semua asumsi yang berhati-hati bahwa nilai tukar rupiah akan stabil pada triwulan terakhir 1998 pada tingkat sekitar Rp10.000 per dolar AS, tetapi diharapkan nilai tukar rupiah itu akan terus menguat. Berdasarkan laju inflasi pada triwulan pertama, laju inflasi untuk tahun 1998/1999 diperkirakan akan mencapai sekitar 66 persen. Tetapi setelah itu laju inflasi diharapkan terus menurun pada bulan-bulan berikutnya. Karena adanya berbagai faktor ketidakpastian yang tinggi maka kerangka ekonomi makro yang digambarkan di sini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.

Makalah yang kami sampaikan dengan topik “Kebijaksanaan Ekonomi Dalam Realita Baru Dunia Usaha Indonesia” diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai upaya-upaya reformasi bidang ekonomi dan keuangan yang saat ini sedang dan akan terus diupayakan perwujudannya pada masa mendatang. Beberapa kebijaksanaan dasar untuk program pemulihan ekonomi nasional akan diuraikan yaitu kebijaksanaan keuangan dan moneter, pemantapan ketahanan pangan dan jaring pengaman sosial (social safety net), pembenahan sistem perbankan nasional, kebijaksanaan struktural dan antisipasi eksternal, serta kebijaksanaan mobilisasi investasi. Diharapkan dengan adanya perangkat-perangkat kebijaksanaan strategis tersebut upaya memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional dapat kita wujudkan secepatnya, termasuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha melalui peningkatan iklim investasi, yang juga menjadi sasaran dari Musyawarah Nasional HIPMI kali ini.

## II. KEBIJAKSANAAN FISKAL DAN MONETER

Salah satu ciri pokok kebijaksanaan fiskal untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia adalah tetap dibatasinya defisit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan adanya tambahan dana luar negeri. Namun, tekanan terhadap anggaran negara makin besar dengan makin buruknya krisis. Depresiasi nilai tukar yang dampaknya dirasakan pada pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran utang luar negeri, turunnya lebel lanjut harga minyak, serta melemahnya kegiatan ekonomi, semuanya itu secara substansial menambah besarnya defisit. Selanjutnya, dengan krisis yang memburuk itu dan dampaknya yang lebih besar terhadap golongan penduduk miskin, maka dirasakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat jaring pengaman sosial guna menanggulangi dampak meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran serta meningkatnya kembali jumlah penduduk miskin.

Untuk menjaga agar defisit anggaran belanja tahun 1998/99 dapat dipertahankan pada tingkat yang wajar, diperlukan langkah-langkah khusus. Dengan melemahnya kegiatan ekonomi, pilihan-pilihan yang mungkin dapat diambil untuk mengurangi defisit menjadi terbatas. Tindakan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berarti dalam jangka pendek ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun dalam jangka menengah kita bermaksud untuk membenahi sistem penerimaan negara, (untuk tujuan ini kita akan meminta bantuan teknis dari IMF). Peningkatan harga-harga pangan dan bahan bakar akan memperberat dampak krisis atas penduduk miskin, dan oleh karena itu perlu ditunda sampai keadaan ekonomi membaik.

Bagaimanapun masih tetap merupakan tujuan kita untuk menghapuskan subsidi segera setelah kegiatan ekonomi dan pendapatan pulih kembali, dan sistem yang memungkinkan penyesuaian secara reguler harga yang diatur pemerintah mulai berlaku pada akhir tahun anggaran ini. Penghematan diharapkan dapat diperoleh dengan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk melalui renegotiasi kontrak-kontrak yang ada dan dari sumber-sumber penerimaan yang semula digunakan di luar anggaran. Namun, sebagian besar penghematan yang diperlukan akan berasal dari pemotongan proyek-proyek infrastruktur. Kita sudah mengkaji-ulang secara hati-hati pengeluaran pembangunan dalam anggaran negara, dan melalui kerja sama yang erat dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia kita telah memotong atau menunda sejumlah proyek sehingga menghemat pengeluaran negara sekitar 2,5 persen PDB.

Kebijaksanaan moneter yang ketat tetap merupakan kunci bagi upaya menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi inflasi yang bersifat spiral, kita bermaksud mempertahankan uang primer dan NDA pada tingkat relatif konstan selama triwulan ketiga tahun 1988. Seperti pada program bulan April 1998, di dalam program moneter dicadangkan dana untuk pembayaran kembali tunggakan hutang antarbank dan hutang perdagangan kepada bank-bank asing, yang akan berimplikasi pada turunnya cadangan devisa bersih (NIR) dengan sekitar 1 miliar dolar AS seiring dengan itu meningkatnya NDA pada akhir bulan Juni 1998. Segera setelah ekonomi stabil, peningkatan NDA dan uang primer yang moderat menjadi sasaran untuk mengakomodasi pemulihan kegiatan ekonomi. Karena adanya ketidakpastian yang cukup besar pada permintaan akan rupiah, kebijaksanaan moneter akan terus dikaji, dan disesuaikan bilamana perlu, termasuk kaitannya dengan perkembangan nilai tukar dan inflasi.

Untuk memperkuat pengelolaan moneter, BI akan mengubah sistem yang dewasa ini dianut, yakni dari sistem dengan tingkat suku bunga SBI ditetapkan secara administratif menjadi sistem lelang sertifikat. Perubahan ini akan dimulai dengan penyempurnaan sistem lelang SBI untuk jangka waktu 1 bulan pada bulan Juli 1998 dan kemudian diperluas untuk semua jangka waktu. Diharapkan lelang SBI akan menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka, menjelang akhir September 1998. Sistem lelang yang baru ini akan menghasilkan struktur tingkat suku bunga yang sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Sementara itu, untuk mempertahankan NDA dan uang primer yang konstan, tingkat suku bunga tampaknya akan tetap tinggi dalam jangka pendek, tetapi akan turun pada saat pasar menjadi stabil. Untuk memberikan BI otonomi dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter, penyusunan rancangan undang-undang

tentang kemandirian bank sentral akan dipercepat dan akan diserahkan kepada DPR menjelang akhir September 1998.

### **III. PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAN JARING PENGAMANAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET)**

Dewasa ini pemerintah menitikberatkan pada upaya menjamin penyediaan yang cukup pada tingkat harga terjangkau dan sistem distribusi yang lancar bagi bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Untuk mencapai tujuan ini, BULOG telah meningkatkan sasaran impor beras untuk tahun 1998/99 dari 2,85 juta ton menjadi 3,1 juta ton. Berbagai upaya khusus dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bagi penduduk miskin, subsidi bahan pangan telah dinaikkan secara berarti pada tahun anggaran ini. Untuk meningkatkan daya beli penduduk miskin, penganggur dan setengah penganggur baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, pemerintah merencanakan proyek-proyek padat karya di berbagai daerah.

Suatu aspek penting usaha pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah merehabilitasi dan memperkuat sistem distribusi yang mengalami gangguan dan kerusakan akibat dari gejolak sosial baru-baru ini. Walaupun perdagangan tampaknya sudah normal kembali di berbagai daerah, pemerintah berpendapat bahwa langkah tambahan dalam jangka pendek diperlukan untuk terus memperbaiki sistem distribusi. Di daerah-daerah yang perdagangan ecerannya sangat terganggu, pemerintah mengaktifkan kembali jaringan perdagangan eceran melalui rehabilitasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional. Pada beberapa daerah miskin dan terpencil, di mana biaya transportasi telah meningkat tajam karena kurangnya suku cadang, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyediakan fasilitas distribusi bahan pangan secara langsung oleh instansi pemerintah.

Sebagai akibat dari memburuknya keadaan ekonomi, jumlah penganggur terbuka meningkat dengan pesat, dan jumlah pekerja yang setengah bekerja (penganggur terselubung) juga meningkat dan meluas. Harga bahan makanan dan obat-obatan yang harus diimpor juga meningkat. Tingkat kemiskinan juga melonjak. Musim kering yang terjadi pada akhir-akhir ini juga menyebabkan kondisi rawan pangan pada beberapa daerah tertentu. Murid-murid terpaksa meninggalkan bangku sekolah sebagai akibat dari krisis ini. Menghadapi masalah-masalah tersebut, Pemerintah berusaha keras menjamin ketersediaan beberapa bahan makanan pokok melalui BULOG, dan untuk sementara akan memberikan subsidi guna menstabilkan harga beras, kedelai, gula, tepung terigu, jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan, yang merupakan bagian terbesar dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin. Selain itu, Pemerintah untuk sementara waktu tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik.

Pemerintah akan memperluas program-program yang ditujukan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan secepat mungkin bagi penduduk miskin. Beberapa di antara program-program ini didanai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, disamping itu akan dilengkapi pula dengan suatu program padat karya dengan upah pangan (*food-for-work*) yang didanai oleh Program Pangan Dunia PBB (*UN World Food Program*). Program distribusi pangan dan penciptaan kesempatan kerja, yang didanai oleh hibah dan pinjaman bilateral bersyarat lunak, juga akan dilaksanakan.

Pemerintah akan meningkatkan alokasi dana bagi program-program sosial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah, Pemerintah merencanakan, dengan bantuan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, memberikan bantuan khusus (*block grant*) kepada SD dan SLTP untuk meringankan biaya sekolah para murid. Program beasiswa untuk menggantikan biaya sekolah yang harus dikeluarkan oleh keluarga tidak mampu bagi pelajar SLTP juga akan dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah akan memperluas program makan siang di sekolah (Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah/PMT-AS). Program-program ini ditujukan bagi rumah tangga-rumah tangga di daerah miskin atau tertinggal.

#### **IV. PEMBENAHAN SISTEM PERBANKAN NASIONAL**

Dalam rangka penyehatan sektor perbankan, bank-bank yang kurang sehat akan diarahkan untuk melakukan penggabungan (merger), peningkatan modal, serta pembekuan operasi. Jika bank dibekukan, dana simpanannya (giro, deposito, dan tabungan) segera dialihkan kepada bank lain yang ditunjuk. Pinjaman yang bermasalah dari bank tersebut akan dialihkan kepada *Asset Management Unit* (AMU) yang merupakan bagian dari BPPN. Adapun langkah pembenahan yang akan diambil, depositor dan kreditur akan tetap dilindungi secara penuh sesuai dengan ketentuan penjaminan. Langkah-langkah lain juga akan diambil untuk memperkuat bank yang relatif sehat.

Keputusan terhadap setiap bank akan didasarkan pada hasil pengkajian portofolio oleh perusahaan akuntan internasional, dengan kriteria yang seragam dan transparan. Pengkajian tersebut sudah selesai dilaksanakan terhadap 6 bank swasta yang telah diambil alih oleh BPPN pada bulan April 1998; pengkajian terhadap 32 bank lagi yang berada dalam pengawasan BPPN dan 15 bank di luar BPPN, direncanakan selesai pada akhir Juli 1998. Selain itu, BPPN akan mengumumkan secepatnya langkah-langkah mengenai penggabungan dua bank pemerintah, Bank Bumi Daya dan BAPINDO.

Untuk memperkuat bank-bank yang relatif sehat, beberapa ketentuan akan dikeluarkan pada akhir Juli 1998 yang mengatur bahwa: (i) bank-bank yang dapat meningkatkan modal dalam batas yang sudah ditentukan akan diperbolehkan menjual kredit bermasalahnya kepada AMU pada harga yang wajar, sehingga meningkatkan kecukupan modal tertimbang menurut resiko (*risk weighted Capital Adequacy Ratio*); dan (ii) pemerintah akan menyediakan modal lapis kedua (*tier two capital*), umumnya dalam bentuk pinjaman subordinasi kepada bank-bank yang modalnya telah dapat ditingkatkan oleh para pemiliknya. Skim-skim tersebut akan disusun berdasarkan hasil kajian portofolio, sistem, dan keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan audit internasional yang diakui.

Semua bank diharuskan memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 4 persen dari aktiva tertimbang menurut resiko pada akhir 1998, meningkat menjadi 8 persen pada akhir 1999 dan 10 persen pada akhir tahun 2000. Bank-bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini akan dikenai sanksi oleh Bank Indonesia. Kewajiban penyediaan modal minimum sebesar Rp250 miliar hanya berlaku bagi bank yang baru dan tidak diberlakukan lagi bagi bank-bank yang telah memiliki izin usaha. Dengan demikian mereka dapat berkonsentrasi pada persyaratan rasio kecukupan modal (CAR).

Dana yang diperoleh akan diserahkan kepada Bank Indonesia untuk mengganti dana dukungan likuiditas yang diberikan kepada bank-bank yang berada dalam pengawasan BPPN. Sisanya, yang berasal dari pengeluaran obligasi pemerintah dengan bunga pasar yang dibayar bulanan, akan digunakan untuk mengkompensasi bank atas pengalihan depositonya, meningkatkan modal bank-bank, dan untuk membantu menyediakan tambahan modal kepada bank-bank yang pemiliknya telah menambah modalnya sendiri. Biaya restrukturisasi perbankan dalam APBN 1998/1999, terutama dalam bentuk biaya bunga obligasi dan biaya operasi BPPN, diperkirakan mencapai Rp15 triliun (1,6 persen dari PDB).

#### **V. KEBIJAKSANAAN STRUKTURAL DAN ANTISIPASI EKSTERNAL**

Pemerintah tetap bertekad untuk melaksanakan seluruh reformasi struktural yang telah disepakati sebelumnya dalam kerja sama dengan IMF, Bank Dunia dan ADB. *Resource Rent Tax* untuk kayu gelondongan dan kayu gergajian telah diberlakukan dan berbagai prosedur sedang disusun untuk mengkaji ulang secara teratur tingkat tarif sesuai dengan perkembangan harga internasional. Larangan ekspor minyak sawit telah dicabut dan badan pemasaran cengkeh telah dihapuskan. Sekarang pabrik rokok dapat secara bebas membeli cengkeh dari sumber manapun. Berbagai upa terus dilakukan agar pihak swasta dapat bersaing dengan BULOG dalam mengimpor dan memasarkan gandum, kedelai, dan gula. Akhirnya, audit dengan menggunakan

standar internasional akan dilakukan terhadap neraca keuangan PERTAMINA, PLN, BULOG, dan dana reboisasi.

Program privatisasi berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Walaupun keadaan ekonomi kurang menggembirakan, namun dengan memperhatikan minat investor luar negeri, kita berkeyakinan bahwa rencana penerimaan negara dari penjualan BUMN sebesar 1,5 milyar dolar AS untuk tahun anggaran 1998/1999 dapat tercapai. Penerimaan terbesar akan diperoleh dari rencana penjualan saham BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, baik domestik maupun internasional.

Pemerintah sepenuhnya menginginkan agar penjualan saham BUMN akan dilakukan melalui proses yang kompetitif dan transparan, konsisten dengan praktek internasional. Sejumlah lembaga internasional telah dipilih untuk memberikan saran dalam penjualan 12 BUMN yang telah ditentukan pada bulan April yang lalu. Bersamaan dengan itu, sejumlah tenaga ahli internasional telah diminta membantu memberikan saran sehubungan dengan permasalahan struktural dan pengawasan. Pendekatan ini akan menjamin terbentuknya landasan teknis yang berkualitas tinggi bagi reformasi BUMN. Bank Dunia bersama ADB menyediakan bantuan teknis dalam mempersiapkan kebijaksanaan utama dan bersifat strategis ini. Hal ini mencakup persiapan penyusunan suatu rencana induk yang akan selesai pada 30 September 1998, yang meliputi reformasi BUMN, program restrukturisasi usaha, dan privatisasi perusahaan.

Penurunan kredit untuk perdagangan (*trade finance*) yang cukup besar pada beberapa bulan terakhir sangat merisaukan, terutama karena dampaknya pada penurunan ekspor. Masalah tersebut disebabkan antara lain karena tidak adanya kesediaan bank asing untuk memberikan konfirmasi terhadap L/C eksportir Indonesia. Masalah ini sudah mulai teratasi dengan adanya bantuan JEXIM, jaminan ekspor dari sejumlah lembaga kredit ekspor, dan kesepakatan fasilitas perdagangan dengan bank asing yang dicapai di Frankfurt. Masalah penting yang masih ada adalah keengganan bank-bank domestik untuk membuka L/C kecuali atas dasar pembayaran secara tunai, atau keengganan untuk memberikan kredit *pre-shipment* karena kondisi sektor usaha swasta di Indonesia yang lemah.

Sebagai pemecahan sementara atau jangka pendek, mulai bulan Juli 1998 Bank Indonesia akan mengadakan program jaminan ekspor *pre-shipment* kepada eksportir yang sudah memperoleh L/C dari luar negeri untuk melancarkan impor bahan yang diperlukan, serta untuk pembiayaan ekspor *pre-shipment*. Jaminan ini diberikan dengan membayarkan biaya (*fee*) untuk setiap jaminan dengan resiko ditanggung bersama antara pemerintah dan bank pelaksana. Program tersebut pada awalnya akan dibatasi sebesar 0,5 milyar dolar AS; sedangkan resiko penjaminan akan ditanggung oleh pemerintah dan bukan oleh BI. Kita percaya bahwa pendekatan darurat ini dapat membantu kelancaran ekspor dalam krisis ini.

Pembiayaan luar negeri yang diperlukan untuk melaksanakan program ekonomi Indonesia ini jumlahnya besar. Walaupun nilai tukar rupiah dewasa ini sangat lemah, namun surplus dalam transaksi berjalan tahun ini diperkirakan akan lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya sebagai akibat hilangnya pasar ekspor akibat kekhawatiran pembeli luar negeri terhadap gangguan pasokan barang di Indonesia. Selain itu, gejolak politik akhir-akhir ini telah menyebabkan terus meningkatnya arus modal ke luar Indonesia dan mengurangi prospek pulihnya pemasukan modal dari luar negeri dalam waktu dekat.

## **VI. KEBIJAKSANAAN INVESTASI DAN PRIVATISASI**

Beberapa langkah kebijakan guna mengatasi krisis moneter dan perekonomian Indonesia selain dapat mendorong perbaikan kinerja ekonomi, juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Kita sepenuhnya menyadari peran penting investasi dalam peningkatan kinerja perekonomian nasional. Investasi merupakan sejenis pengeluaran yang mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan sebagai penambah jumlah barang modal dalam masyarakat untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghasilkan produk-produk baru. Dalam proses produksi yang ditimbulkan oleh suatu investasi akan diserap tenaga kerja baru serta

akan dimanfaatkan faktor-faktor produksi, yang kesemuanya ini akan ikut memutar roda perekonomian nasional.

Dalam reformasi bidang penanaman modal kita sepenuhnya sepakat untuk menghilangkan hambatan (red tapes) serta menciptakan stabilitas yang diperlukan guna mendorong investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa kebijaksanaan yang saat ini sedang di tempuh dan di upayakan oleh Pemerintah antara lain pelimpahan wewenang pemberian persetujuan investasi PMA dan PMDN langsung kepada BKPM; penetapan pelayanan termasuk persetujuan di bawah satu atap di BKPM/BKPM.

Dalam reformasi bidang investasi dan deregulasi, Pemerintah telah mencabut peraturan yang membatasi kepemilikan investor asing sampai dengan 49% dari perusahaan yang telah terdaftar pada pasar modal dan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang direvisi dengan penyederhanaan dan pengurangan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi investor. Selain itu akan dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai bidang kegiatan yang akan di cadangkan untuk usaha kecil serta kegiatan dengan pola kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah dan besar. Sejalan dengan paket IMF, Pemerintah telah mencabut pembatasan investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit, pembatasan dalam perdagangan eceran dan perdagangan besar, mencabut ketentuan tata niaga yang membatasi pemasaran semen, kertas dan kayu lapis, serta menghapus harga pasokan semen (HPS) dan mengizinkan produsen semen untuk mengeksport hanya dengan menggunakan izin eksportir umum.

Guna lebih memantapkan upaya reformasi ekonomi, khususnya di bidang investasi, Pemerintah sedang menyiapkan untuk mengganti Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang PMDN menjadi satu Undang-undang Penanaman Modal. Dengan adanya Undang-undang yang baru ini maka perlakuan yang sangat berbeda terhadap PMA dan PMDN di minimalkan pada batasan perbedaan teknis-administratif meskipun tetap mengacu dan selalu berorientasi kepada upaya penyederhanaan mekanisme dan prosedur penanaman modal.

Reformasi menyeluruh yang dilaksanakan oleh Pemerintah juga ditujukan bagi upaya Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Privatisasi ini akan memberikan peluang bagi investasi baik PMA maupun PMDN untuk membeli dan memiliki saham BUMN. Beberapa kebijaksanaan yang telah dilaksanakan antara lain menetapkan prosedur pengadaan barang pemerintah dan prosedur pemberian kontrak yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur; mengumunkan tujuh BUMN yang akan di swastakan pada tahun 1998/99, mengidentifikasi lima BUMN yang akan masuk pasar modal dalam tahun 1998/99; dan menetapkan prosedur yang transparan untuk penjualan saham dan privatisasi.

Beberapa kebijaksanaan privatisasi yang sekaligus dapat memberikan peluang bagi investasi baru sedang disiapkan oleh Pemerintah, antara lain, menerapkan kerangka kerja yang jelas bagi pengelolaan dan privatisasi aset negara, termasuk kriteria untuk menentukan apakah suatu BUMN di swastakan, di restrukturisasi atau ditutup; mempersiapkan rencana tindak untuk seluruh 164 BUMN serta menetapkan secara jelas sasaran kinerja dan keuntungan BUMN; menawarkan penjualan lebih lanjut saham milik pemerintah di BUMN yang telah terdaftar di bursa; serta mengaudit BUMN yang tidak sehat dan menyusun rencana penutupannya.

## **VII. HIPMI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA INDONESIA**

Dengan berbagai perangkat kebijaksanaan reformasi ekonomi di atas, kita berharap stabilisasi dan peningkatan kinerja ekonomi nasional dapat lebih dimantapkan serta iklim berusaha akan semakin kondusif untuk dapat menarik investasi PMA dan PMDN sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kebijaksanaan di atas belum sepenuhnya memadai apabila tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan dan manajerial dari seluruh institusi ekonomi nasional. Sebagai pelaku pembangunan ekonomi, HIPMI dituntut untuk bersikap lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang-peluang pembangunan yang ada, serta melaksanakan aliansi strategis

dengan calon investor baik dalam maupun luar negeri guna mengupayakan peningkatan porsi investasi nyata di Indonesia.

Upaya proaktif juga perlu terus dikembangkan oleh HIPMI guna memanfaatkan peluang investasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Potensi investasi di Indonesia akan semakin terbuka dengan adanya reformasi total meliputi bidang ekonomi, politik dan hukum, mengingat reformasi ini akan semakin mendorong dan meningkatkan transparansi, demokratisasi serta kepastian hukum, yang kesemuanya merupakan elemen dasar bagi terwujudnya investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Potensi yang selama ini telah diidentifikasi seperti potensi investasi di 13 Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta potensi pembangunan di Kawasan Andalan yang berjumlah 111 kawasan baik di KTI maupun di KBI, hendaknya dapat diobservasi secara seksama dan di upayakan langkah-langkah bagi perwujudan secara nyata oleh HIPMI dengan mengembangkan kegiatan Aliansi Strategis dan Kemitraan dengan perusahaan yang bonafide baik dari dalam maupun luar negeri.

HIPMI perlu mendorong inisiatif BKPM dan Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan “Regional Investment Profiles” atau RIP yang merupakan suatu *consolidated master plan* dari berbagai unsur pembangunan seperti tata ruang, prasarana dan sarana wilayah (listrik, telekomunikasi, prasarana dan sarana perhubungan termasuk jalan, sistem irigasi dan penyediaan air baku), sektor-sektor strategis wilayah dan potensi-potensi sektoral yang belum dikembangkan, serta informasi di masing-masing wilayah yang menyangkut potensi faktor produksi termasuk tenaga kerja, sistem perbankan dan permodalan, bahan baku produksi, tingkat ketersediaan teknologi, serta sistem distribusi dan pemasaran.

Dalam era ekonomi yang lebih transparan dan demokratis, peluang usaha akan semakin terbuka bagi seluruh anggota HIPMI. Dengan adanya penyederhaan dan pengurangan jumlah usaha yang tertutup bagi para investor (DNI) serta pencabutan pembatasan investasi pada sektor-sektor strategis seperti telah diuraikan sebelumnya, jelas akan semakin meningkatkan aksesibilitas usaha HIPMI. Program privatisasi BUMN yang sedang dilaksanakan saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh anggota HIPMI untuk mengembangkan aliansi strategis dengan calon investor asing (PMA). Peluang usaha juga terbuka bagi anggota HIPMI untuk memanfaatkan kekosongan usaha-usaha distribusi khususnya sembako serta produksi barang dan jasa yang menjadi program utama Pemerintah yaitu program jaring pengaman sosial.

Terbukanya peluang pengembangan usaha tersebut perlu diimbangi dengan langkah-langkah peningkatan profesionalisme HIPMI. Akuntabilitas perusahaan perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya memantapkan *entrepreneurship* atau jiwa kewirausahaan. Anggota HIPMI bersama-sama dengan Pemerintah dan Dunia Usaha lainnya perlu meningkatkan *sense of crisis* dan *sense of urgency* khususnya yang menyangkut penyusunan prioritas kegiatan yang berpihak pada masyarakat, misalnya melalui pengembangan program padat karya untuk menampung kelebihan tenaga kerja.

Demikian beberapa kebijaksanaan ekonomi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah guna mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, dan sekaligus sebagai upaya pemantapan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih demokratis di masa mendatang. Kita semua bertekad untuk mengerahkan segenap daya upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini dan menjadikan perekonomian Indonesia menjadi maju dan mandiri. Hal ini jelas sejalan dengan tekad HIPMI untuk mewujudkan konsep “Strategi Mencapai HIPMI Mandiri”. Selamat melaksanakan Musyawarah Nasional HIPMI ke 10.